

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.P. Parlindungan, 1989, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform*, Rajawali Mandar Maju, Bandung.
- Ali Achmad Chomzah, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- Aries S. Hutagalung, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta
- Abu Daud Busroh, 1998, *Pemeriksaan Keuangan Negara*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Anang firmansyah dan Budi W Mahardika, 2018, *Pengantar Manajemen*, Deepublish, Yogyakarta.
- Budi Harsono, 2003, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaan*, Djambatan, Jakarta
- 2002, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Budi Untung, 2015, *22 Karakter Pejabat Umum (Notaris dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, ANDI, Yogyakarta.
- Dessy Anwar, 2001, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Aditama, Surabaya
- Djuhaendah Hasan, 2004, *Kajian Peraturan Pertanahan*, PT. Harfarindo, Jakarta
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Erni Tris Kurniawan, Sule dan Saefullah, 2005, *Pengantar Manajemen*, Prenada Media, Jakarta

- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan)*, Mandar Maju, Bandung.
- 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya, Bandung
- Hans Kelsen, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*, Topoffset. Percetakan, Yogyakarta.
- Muhammad Yamin Lubis,dan Abdul Rahim Lubis, 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta Tanah*, Karya Media, Yogyakarta
- Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta.
- M. Kadarisman, 2013, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rajawali, Jakarta
- Mukti Fajar Nurdewata, *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Univerrsitat Lampung, Bandar Lampung.
- Rusli Effendy, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, LEPPEN–UMI, Makassar.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administerasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Siagian, Sondang. P, 2000, *.Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta.

Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----1983, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

-----1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

-----2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Tulus Pujiono, 2006, *Penerapan UUPA Belum Optimal*, Majalah Renvoi Nomor 7.43.IV, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.

Yunawati Karlina dan Irwan Sapta Putra, 2022, *Pemberantasan Mafia Tanah Dengan Menggunakan Instrumen Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum.

Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta

UNDANG-UNDANG

KUHPerdota

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang PPAT

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

JURNAL/KARYA ILMIAH

Aditia Syaprillah, 2016, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan*, Jurnal Bina Hukum Lingkungan Volume 1, Nomor 1.

Hartana, et.al., 2019, *Peran Pemerintah Dalam Menangani Mafia Tanah Sebagai Perlindungan Kepada Pemilik Hak Tanah*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 7 No. 3.

Muhammad Chafi Sholeh, 2021. *Analisis Yuridis Resiko Pemalsuan Terhadap Pengadaan Sertifikat Elektronik di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 27 No. 10, Juli 2021. Unisma.

Marsella, 2015, *Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional*, Penegakan Hukum, Vol.2 No.2

M. Jeffri Arlinandes Chandra, JT.Pareke. 2011, *Kewenangan Bank Indonesia Dalam Mengatur Dan Mengawasi Perbankan Di Indonesia Setelah Terbitnya Undang- Undang No 21 Tahun 2011 Tentang OJK*. CV. Zigie Utama, Bengkulu.

Pranoto, H., 2020, *Sengketa Sertifikat Hak Milik Ganda dalam Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16, Nomor 1

Rizky Aulia, 2017, *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Di Bawah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN*, Jurnal HIMA HAN, Vol.4 No.2

Sepyo Achanto, 2022, *Pembinaan dan Pengawasan PPAT Dalam Mencegah Terlibat Mafia Tanah (Disampaikan dalam Kegiatan Rakernas Pengurus IPPAT)*, Jakarta

Putri Fransiska Purnama, 2020, *Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Kota Palangkaraya*, Literasi Hukum, Palangkaraya

RESPONDEN

1. Octorio Ramiz (PPAT Kota Makassar)
2. Idham Hamja (PPAT Kota Makassar)
3. Liong Rahman (PPAT Kota Makassar)
4. Nurjabal Rahmah (Penata Pertanahan Muda pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan)
5. Khadijah Syahrana (Koordinator Kelompok Subtansi Pemeliharaan Hak Tanah Ruang dan Pembinaan PPAT)

WEBSITE

<https://ekbis.sindonews.com/read/973627/34/menteri-hadi-ungkap-5-pihak-yang-kerap-menjadi-bagian-mafia-tanah>.

<http://digilib.unila.ac.id/11500/3/BAB%20II>.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211118080653-20-722758/kronologi-lengkap-kasus-mafia-tanah-nirina-zubir>.

inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76.

<https://cenderawasihpos.jawapos.com/berita-utama/20/12/2022/tumpang-tindih-sertifikat-indikasi-adanyamafia-tanah>.

<https://www.borneonews.co.id/berita/265183-menang-perkara-perdata-pemilik-tanah-laporkan-pemalsuandokumen-ke-polda-kalteng>.

<https://www.suarapemredkalbar.com/read/nasional/20072022/polisi-ungkap-modus-baru-sindikata-mafia-tanah-maling-tanah-retas-sistem-komputerisasi-pertanahan>.

<https://www.rumah.com/panduan-properti/mafia-tanah>.

<https://infopublik.id/kategori/politik-hukum/398388/kejaung-dankementarian-atr-bpn-jalin-kerjasama-lintas-sektoral>.